

PERANAN KEBIJAKAN TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Noviani Herdianti¹, Alfroki Marta²

Pendidikan Dasar, Universitas Adzkia ^{1,2}

Email: novianiherdianti724@gmail.com, alfroki.m@adzkia.ac.id

ABSTRAK

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang secara langsung memengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran. Di Indonesia, kebijakan kurikulum pendidikan dasar terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan kebijakan kurikulum pendidikan dasar dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, artikel ini mengkaji pengaruh kebijakan kurikulum terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kurikulum yang relevan, fleksibel, dan berbasis kebutuhan peserta didik dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Namun, kesuksesan implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, guru, dan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan pendidikan, Kurikulum Pendidikan Dasar,

ABSTRACT

The curriculum is an important component in the education system which directly influences the quality of the learning process and outcomes. In Indonesia, basic education curriculum policies continue to change to adapt to societal needs and global challenges. This article aims to analyze the role of basic education curriculum policy in improving the quality of education in Indonesia. Using a literature-based qualitative approach, this article examines the influence of curriculum policy on achieving national education goals and identifies the challenges faced in its implementation. This research found that curriculum policies that are relevant, flexible, and based on student needs can significantly improve the quality of education. However, successful implementation of this policy requires support from various parties, including the government, teachers and the community.

Keywords: *Education policy, Basic Education Curriculum.*

Pendahuluan

Pendidikan dasar memegang peranan strategis dalam membentuk fondasi pengetahuan, keterampilan, dan karakter anak. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah ada Prananda, (2020). Pendidikan dasar memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan

digunakan anak sepanjang hidup mereka, serta membentuk sikap dan karakter yang akan mempengaruhi interaksi sosial dan keberhasilan mereka di masa depan.

Di Indonesia, kebijakan tentang kurikulum pendidikan dasar dirancang untuk menciptakan sistem pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman Aristanto, (2024).. Menurut teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget, pembelajaran yang baik harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses menemukan pengetahuan mereka sendiri Putra, (2021). Kurikulum yang fleksibel dan dinamis akan memberikan ruang bagi siswa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, sambil tetap memperhatikan perkembangan kognitif dan sosial mereka.

Perubahan kurikulum yang diterapkan merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam perspektif teori pembelajaran sosial, perubahan kurikulum juga harus memperhatikan bagaimana siswa belajar dari pengaruh lingkungan sosialnya, termasuk guru, teman sebaya, dan keluarga. Perubahan tersebut bertujuan agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Namun, meskipun telah dilakukan berbagai perubahan kurikulum, efektivitas kebijakan ini sering kali dipertanyakan. Dalam teori distribusi sumber daya yang dikemukakan oleh Eric Hanushek, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum itu sendiri, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung implementasinya, seperti kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan alat bantu pembelajaran. Kesenjangan dalam implementasi kurikulum sering kali terjadi akibat keterbatasan sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru juga sering kali tidak maksimal. Dalam teori pembelajaran berbasis tugas (task-based learning) yang dikemukakan oleh David Nunan, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kurangnya persiapan dan pelatihan bagi guru akan menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan peran ini secara efektif, yang pada gilirannya memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum.

Sistem evaluasi yang kurang memadai juga menjadi tantangan dalam memastikan keberhasilan implementasi kurikulum. Dalam teori evaluasi pendidikan dari Scriven, evaluasi pendidikan harus bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek, baik dari sisi pembelajaran akademik, pengembangan keterampilan, maupun perkembangan karakter. Evaluasi yang terbatas hanya pada tes dan ujian seringkali tidak mencerminkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kurikulum.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memastikan pendidikan dasar yang berkualitas. Teori kolaborasi yang dikemukakan oleh Vygotsky, yang dikenal dengan konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), menyatakan bahwa kolaborasi antara individu yang lebih berpengalaman dan individu yang kurang berpengalaman dapat mempercepat proses pembelajaran. Dalam konteks ini, kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan optimal bagi anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kurikulum di beberapa SD IT. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan guru dan kepala sekolah, serta analisis dokumen kurikulum SD IT. Sekolah yang menjadi objek penelitian dipilih berdasarkan kriteria keberhasilan implementasi program penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Kurikulum di Indonesia

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan kurikulum, masing-masing disesuaikan dengan visi pembangunan nasional. Kurikulum 2013, misalnya, menekankan pendekatan berbasis kompetensi, penguatan pendidikan karakter, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka, yang mulai diperkenalkan pada tahun 2022, lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik dengan memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek.

Kurikulum di Indonesia dari masa ke masa

Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah dan latar belakang perubahan kurikulum di Indonesia:

1. Kurikulum 1947 (Rencana Pelajaran 1947)

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, sistem pendidikan kolonial dianggap tidak relevan. Kurikulum ini dirancang untuk menggantikan kurikulum Belanda, dengan fokus pada pembentukan karakter bangsa dan semangat kemerdekaan.

Materi pelajaran lebih sederhana, dengan penekanan pada pendidikan moral dan nasionalisme.

2. Kurikulum 1952

Indonesia mulai merumuskan identitas nasional yang lebih kuat dalam pendidikan.

Kurikulum disusun dengan lebih terperinci, mengutamakan relevansi dengan kehidupan siswa, dan guru diberikan kebebasan mengembangkan metode pengajaran.

3. Kurikulum 1964

Fokus pada pengembangan keterampilan dasar (ilmu pengetahuan, seni, olahraga, dll.), yang dikenal dengan "Pancawardhana" (kecerdasan, keterampilan, moral, seni, dan fisik). Pendidikan diarahkan untuk membangun manusia yang produktif sesuai kebutuhan pembangunan.

4. Kurikulum 1968

Perubahan politik setelah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemerintah ingin memprioritaskan ideologi Pancasila dalam pendidikan.

Fokus pada pembentukan manusia Pancasila yang kuat, beriman, bertanggung jawab, dan bermoral.

5. Kurikulum 1975

Peningkatan efisiensi pendidikan untuk mendukung pembangunan nasional. Kurikulum ini mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis. Metode pengajaran berbasis tujuan instruksional, dengan rancangan yang sangat rinci.

6. Kurikulum 1984

Respon terhadap kritik terhadap metode pengajaran yang terlalu berorientasi pada guru. Pendekatan pembelajaran aktif mulai diperkenalkan.

Dikenal sebagai kurikulum "Cara Belajar Siswa Aktif" (CBSA), dengan fokus pada keterlibatan siswa dalam proses belajar.

7. Kurikulum 1994

Mengatasi kekurangan kurikulum 1984. Kurikulum ini mencoba mengintegrasikan pendekatan tradisional dan pembelajaran aktif. Pendekatan terpadu, namun dikritik karena terlalu padat dan membebani siswa.

8. Kurikulum 2004 (*Kurikulum Berbasis Kompetensi - KBK*)

Perubahan global dan tuntutan akan keterampilan abad ke-21. Fokus pada pengembangan kompetensi siswa, baik akademik maupun non-akademik, dengan pembelajaran berbasis proyek.

9. Kurikulum 2006 (*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan - KTSP*)

Desentralisasi pendidikan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal, namun tetap berpedoman pada standar nasional.

10. Kurikulum 2013 (*K-13*)

Kritik terhadap KTSP yang dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman. Menekankan pendidikan karakter, literasi, keterampilan abad ke-21, dan pendekatan tematik integratif.

11. Kurikulum Merdeka (2022)

Pandemi COVID-19 mempercepat kebutuhan akan kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan teknologi. Menekankan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), personalisasi pembelajaran, dan pengembangan profil Pelajar Pancasila.

Peranan Kebijakan Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

1. *Meningkatkan Keterampilan Abad 21*

Kebijakan kurikulum yang baik mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan demikian, lulusan pendidikan dasar dapat lebih siap menghadapi tantangan global.

2. *Penguatan Pendidikan Karakter*

Pendidikan karakter menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan kurikulum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki moral yang baik.

3. *Peningkatan Kualitas Guru*

Implementasi kebijakan kurikulum mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan. Guru yang kompeten akan lebih mampu menerapkan kurikulum secara efektif di kelas.

4. *Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran*

Kurikulum modern mendorong integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih interaktif dan relevan dengan dunia digital.

Tantangan dalam Implementasi

1. Kesenjangan Fasilitas Pendidikan

Tidak meratanya fasilitas pendidikan di berbagai daerah menjadi hambatan utama dalam implementasi kurikulum yang efektif.

2. Kurangnya Pelatihan Guru

Masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait penerapan kurikulum baru.

3. Resistensi terhadap Perubahan

Perubahan kurikulum sering kali menghadapi resistensi dari berbagai pihak, baik guru, orang tua, maupun siswa.

Kesimpulan

Kebijakan kurikulum pendidikan dasar memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Dengan kebijakan yang relevan dan implementasi yang tepat, mutu pendidikan dasar di Indonesia dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu mencetak generasi yang kompeten, berakarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Daftar Pustaka

- Aristanto, A., Maq, M. M., Iqbal, M., Prananda, G., & Efrina, G. (2024). NEW LEARNING PARADIGM THROUGH KURIKULUM MERDEKA IN PRIMARY SCHOOLS. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 5398-5408.
- Depdikbud. (2013). *Kurikulum 2013: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Prananda, G., Saputra, R., & Ricky, Z. (2020). Meningkatkan hasil belajar menggunakan media lagu anak dalam pembelajaran ipa sekolah dasar. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(2), 304-314.
- Putra, K. T. H., Prananda, G., Meilana, S. F., Silitonga, M., Amon, L., Pertiwi, S., ... & Simorangkir, S. B. (2021). *Teori Landasan Pendidikan Sekolah Dasar*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- UNESCO. (2021). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.